

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan memainkan peran vital dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional, khususnya melalui fungsi intermediasi keuangannya. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) menghadapi tekanan signifikan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang optimal di tengah kondisi pasar yang terus berubah. Tekanan ini semakin intensif akibat dampak pandemi COVID-19, yang telah memperburuk risiko kredit macet dan menekan margin laba bersih. Dalam kondisi ini, praktik manajemen laba sering digunakan sebagai strategi untuk mempertahankan citra perusahaan yang positif di mata investor, kreditor, dan regulator, khususnya dalam penyajian laporan kinerja keuangan tahunan (Susilo et al., 2024). Bank merupakan Lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) dan pihak yang membutuhkan dana (*defisit*). Bank juga berperan dalam menyediakan pembiayaan bagi perekonomian riil guna mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran penting bank menjadikannya objek penelitian untuk membuktikan adanya manajemen laba di sektor perbankan, karena adanya regulasi ketat, terutama dari pemerintah (Nurhafifah et al., 2025).

Kinerja perusahaan yang baik ditandai dengan pertumbuhan laba setiap periode. Pertumbuhan laba dapat menjelaskan sejauh mana kemampuan

manajemen dalam mengelola aset dan kewajiban agar menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini mendorong manajemen agar semaksimal mungkin menjaga stabilitas keuangan perusahaan sehingga laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan perusahaan perusahaan lebih tinggi dari periode sebelumnya (Permata & Dewi, 2024).

Laporan keuangan adalah dokumen yang memuat informasi mengenai pencatatan keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu (Nurhafifah et al., 2025). Salah satu komponen penting dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Fokus investor yang lebih tertuju pada besaran laba yang dilaporkan oleh perusahaan, tanpa mempertimbangkan metode atau prosedur yang digunakan dalam penyusunannya membuka peluang bagi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba (Hidayah et al., 2025).

Data laba bersih perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025 menunjukkan adanya fluktuasi laba bersih yang cukup signifikan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data laba perusahaan perbankan pada periode 2021-2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Laba Bersih Perusahaan Perbankan Tahun 2021-2025
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

No	Kode	2025	2024	2023	2022	2021
1	BBKP	66.588	-6.328.620	-6.055.703	-5.032.504	-2.302.279
2	BBYB	565.690	19.885	-573.180	-789.059	-986.289
3	BINA	-369.018	81.848	207.876	157.048	39.748
4	ARTO	276.234	128.518	72.362	15.913	86.024
5	BTPN	-102.129	3.216.240	2.682.484	3.629.564	3.104.215

Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa laba bersih pada tahun 2021-2025 pada Bank KB Indonesia Tbk (BBKP), Bank Neo Commerce Tbk (BBYB), Bank Ina Perdana Tbk (BINA), dan Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) cenderung stabil bahkan di tahun tertentu mengalami penurunan. Sedangkan Bank Jago Tbk (ARTO) setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan, bahkan di tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan.

Bank Jago Tbk (ARTO) berhasil mencatatkan laba bersih setelah pajak atau *net profit after tax* (NPAT) sebesar Rp276 miliar pada tahun 2025. Jumlah itu meningkat 115% secara tahunan atau *year on year* (yoy) dari setahun sebelumnya (CNBC Indonesia, 2026). Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) berhasil mencatatkan titik balik kinerja pada tahun buku 2025. Setelah sebelumnya merugi Rp6,33 triliun pada 2024, Perseroan kini membukukan laba bersih sebesar Rp66,59 miliar. Menurut Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie, “Pencapaian laba bersih di tahun 2025 merupakan hasil dari disimplin eksekusi strategi transformasi yang kami jalankan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkualitas dan berkelanjutan” (Warta Ekonomi, 2026).

Kinerja keuangan Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) menunjukkan pelemahan signifikan sepanjang tahun 2025. Bank mencatat rugi bersih sebesar Rp102,1 miliar pada tahun 2025, berbanding terbaik dengan laba Rp3,22 triliun pada 2024 (Ipotnews, 2026). Sepanjang 2025, Bank Ina Perdana Tbk (BINA) menderita rugi bersih mencapai Rp369,02 miliar atau berbanding terbalik

dengan kinerja di tahun buu 2024 yang masih bisa membukukan laba bersih Rp81,85 miliar (Ipotnews, 2026).

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan manajer dalam rangka merekayasa laporan keuangan agar terlihat baik di mata stakeholder (Pratiwi et al., 2023). Praktik manajemen laba sering kali memanfaatkan celah perbedaan metode pengukuran antara standar akuntansi keuangan komersial dengan regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga memicu terjadinya penyesuaian berupa koreksi fiskal positif maupun negatif. Beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan yang timbul dari proses ini pada dasarnya membuka celah bagi pihak manajemen untuk mengelola dan merekayasa pelaporan keuangan komersial demi kepentingan tertentu (Sari & Karlina, 2024).

Urgensi pelaporan keuangan perbankan menjadi semakin kompleks karena laba yang disajikan oleh manajemen tidak sekadar menjadi indikator prestasi bagi pihak internal, melainkan juga digunakan sebagai basis utama dalam penentuan kewajiban perpajakan. Ketika perusahaan berhasil membukukan laba yang tinggi, kondisi tersebut menjadi kabar baik bagi stakeholder sekaligus bagi otoritas fiskal karena potensi penerimaan negara ikut meningkat. Namun, bagi internal manajemen, pelaporan laba yang besar secara linier akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan, yang pada akhirnya justru akan mendistorsi dan mengurangi laba bersih yang dapat ditahan oleh Perusahaan (Pratiwi et al., 2023). Hubungan yang bertolak belakang ini mendorong manajemen melakukan tindakan manajemen laba dengan menggunakan perbedaan aturan akuntansi komersial dan fiskal.

Menurut Fitri & Machdar (2023), celah perbedaan temporer inilah yang kemudian dimanfaatkan melalui penyesuaian akun aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan agar performa perusahaan tetap sehat di mata investor.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui akibat adanya perbedaan temporer yang menyebabkan laba akuntansi komersial lebih kecil dibandingkan dengan laba fiskal menurut undang-undang perpajakan (Nur Hasanah et al., 2024). Aset pajak tangguhan sebagai manajemen laba biasanya dilakukan dengan cara mengakui lebih awal biaya yang belum sepenuhnya dibayar, atau memanfaatkan rugi fiskal yang masih bisa dikompensasi (Mala et al., 2025).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rhofitania et al. (2023) menemukan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Besarnya nilai pajak tangguhan yang dinaikkan oleh manajemen dilatarbelakangi oleh pemberian bonus, beban politik perusahaan, dan minimisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Sebaliknya, Fitri & Machdar (2023) serta Lubabah & Andayani (2026) membuktikan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba. Berdasarkan teori keagenan, situasi ini muncul karena manajer lebih memilih menggunakan mekanisme lain yang dianggap lebih efektif dalam memengaruhi laba yang dilaporkan. Dalam praktiknya, manajemen memilih menyesuaikan estimasi cadangan kerugian kredit, mengakui pendapatan berdasarkan akrual, atau menunda pengakuan beban, yang secara langsung

berdampak pada laba periode berjalan dibandingkan dengan menggunakan aset pajak tangguhan yang memiliki pengaruh tidak langsung (Lubabah & Andayani, 2026).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi manajemen laba adalah beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan serta beban tertentu berdasarkan persamaan standar akuntansi keuangan (PSAK) dengan peraturan perpajakan. Beban pajak tangguhan ini timbul dari proses koreksi fiskal dimana terdapat koreksi negatif, yaitu nilai pendapatan berdasarkan akuntansi lebih tinggi daripada nilai pendapatan berdasarkan pajak, dan nilai biaya berdasarkan akuntansi lebih rendah daripada nilai biaya berdasarkan pajak. Manajemen malakukannya dengan mempertimbangkan bahwa investor melihat kinerja perusahaan dari nilai laba sebelum pajak, bukan dari laba setelah pajak (Machdar & Nurdiniah, 2021).

Penelitian Putri et al. (2023) dan Fitri & Machdar (2023) menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan menyebabkan tingkat laba yang didapat menjadi rendah dan biaya menjadi meningkat naik, dengan demikian peluang untuk mendapatkan laba di masa yang akan datang menjadi lebih tinggi dan mengurangi besarnya pajak yang akan dibayarkan. Perusahaan memanfaatkan celah dalam melakukan praktik manajemen laba akrual dengan menggunakan

jumlah beban pajak tangguhan dalam laporan keuangan untuk menghindari pelaporan kerugian, jadi laba kena pajak akan terkoreksi (Puspita Sari & Afandi, 2023).

Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Gulo & Mappadang (2022) yang menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Semakin tinggi angka beban atas pajak tangguhan perusahaan, maka beban perusahaan pada periode mendatang semakin tinggi. Hal ini tentu tidak menguntungkan perusahaan, karena beban yang semakin besar mempengaruhi pencapaian keuntungan (laba) perusahaan. Hal ini mengindikasikan perusahaan tidak menginginkan angka beban pajak tangguhan yang diakui perusahaan semakin meningkat, selain itu beban pajak tangguhan yang diakui perusahaan tidak mempengaruhi manajemen melakukan praktik tindakan manajemen laba tetapi hanya akan menambah jumlah beban perusahaan karena berefek pada turunnya laba.

Financial distress dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut mempunyai masalah keuangan. Perusahaan dapat dikatakan mengalami kondisi *financial distress* apabila pada saat perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur pada waktu yang telah ditentukan (Damayanti & Krisnando, 2021). Tingkat *financial distress* yang semakin tinggi akan mendorong perusahaan untuk terus mengevaluasi kinerja manajemen dan jika dinilai kinerja manajemen dalam mengatasi suatu kondisi ini, maka perusahaan akan

melakukan sebuah rotasi atau penggantian terhadap manajemen (Fitri & Machdar, 2023).

Penelitian dilakukan Fitri & Machdar (2023) menyatakan bahwa variabel aset pajak tangguhan dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi memperlemah dan tidak berpengaruh negatif di dalam hubungan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba akrual. Sedangkan variabel beban pajak tangguhan dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi memperkuat dan berpengaruh positif di dalam hubungan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba akrual. Jadi apabila tidak dilakukan manajemen laba pada beban pajak tangguhan itu akan membuat tanggung jawab perusahaan menjadi lebih besar dan hal tersebut dapat menjadi bagian dari penyebab terjadinya *financial distress*.

Penelitian juga dilakukan oleh Siti Zahara et al. (2025) menunjukkan bahwa memperkuat dan berpengaruh positif dalam hubungan antara aset pajak tangguhan dan manajemen laba. Pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba menjadi lebih kuat ketika perusahaan berada dalam tekanan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan menghadapi masalah keuangan, kondisi tersebut tidak memotivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Selain itu, penelitian Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai *financial distress* tidak akan berpengaruh terhadap manajemen laba. Ketika keuntungan jatuh jauh dari harapan, organisasi dengan kesehatan keuangan yang baik serta mereka yang mengalami krisis keuangan terkadang menggunakan teknik manajemen laba. Dana investasi seharusnya

membantu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk bangkit kembali sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab keuangannya.

Kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) diduga kuat menjadi faktor kontekstual yang memoderasi hubungan tersebut. Ketika bank berada dalam kondisi *financial distress*, tekanan untuk melakukan manajemen laba akan semakin ekstrem demi menghindari penarikan dana masal oleh nasabah serta menjaga kepercayaan kreditor. Dalam situasi tertekan dorongan manajemen untuk memanfaatkan akun dan beban pajak tangguhan sebagai alat manajemen laba akan menjadi jauh lebih agresif dibandingkan saat perusahaan dalam kondisi normal. Oleh karena itu *financial distress* ditempatkan sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah kondisi kesulitan keuangan tersebut memperkuat tindakan manajemen laba melalui instrument pajak tangguhan.

Perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya serta urgensi kondisi keuangan perusahaan membuka ruang bagi peneliti untuk menguji kembali pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba akrual. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Akrual dengan *Financial Distress* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2025”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 – 2025. Variabel independen yang diteliti adalah aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan, dengan manajemen laba sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan Modified Jones Model. *Financial distress* digunakan sebagai variabel moderasi. Penelitian hanya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan tidak mencakup faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka penulis menetapkan empat rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun empat rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba akrual?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba akrual?
3. Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba akrual?
4. Apakah *financial distress* memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba akrual?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba akrual.
2. Untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba akrual.
3. Untuk menguji *financial distress* memoderasi pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba akrual.
4. Untuk menguji *financial distress* memoderasi pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba akrual.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Uraian tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan bahan referensi dan diskusi berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam memecahkan permasalahan yang ada sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

b. Bagi Universitas PGRI Madiun

Dapat menjadi kajian mata kuliah terutama yang berkaitan dengan akuntansi khususnya pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.